

**KETERKAITAN KUALITAS TATA KELOLA KORPORASI,  
IMPLEMENTASI PRINSIP ETIKA BISNIS DAN  
POTENSI KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN**

**Muhammad A. Nuryatno**  
Universitas Trisakti

*Abstract*

*The purpose of this research is to make clear the phenomena about the relationship between the likelihood of the financial reporting fraud, the implementation of business ethics principles and the quality of corporate governance. The objective of this research is to test empirically about them, based on auditors' perception. The method used or the detailed of the study are: the nature of the study was hypothesis testing; the type of investigation used was causal relationship; the extent of researcher interference was minimal; the environment where the research undertaken was field experiment; unit of analysis was individual, ie. the Public Accountants; and the frequency of gathering the necessary data was one-shot or cross-sectional. The source of data was Indonesia Public Accountants wich formed as population, and the sample were determined by purposive sampling method. Sample data were collected using questionnaire circulated by mail and research assistants. Data analysis was conducted by Structural Equation Modeling (SEM). The results showed some empirical evidences : According to auditors' perception, the likelihood of financial reporting fraud are (is) affected by client's corporate governance quality and / or implementation of the business ethics principles. Based on those results, it is suggested: First, to the next researcher, to study the relationship between financial reporting fraud and oversight committee, such as risk management and/or nomination committee. Second. to the management, to minimize the financial reporting fraud by strengthening the quality of corporate governance and implementation of business ethics principles.*

**Key words:** *Financial Reporting Fraud, Corporate Governance, Business Ethics,*

## PENDAHULUAN

Kecurangan pelaporan keuangan selalu menjadi pusat perhatian auditor (Cohen dan Hanno, 2000). Arens *et al.* (2006) mencatat bahwa kecurangan pelaporan keuangan meliputi pelaporan keuangan yang menyesatkan (*fraudulent financial reporting*) dan penyalahgunaan aset (*misappropriation of assets*). Penelitian Cohen dan Hanno (2000) memperlihatkan perlunya auditor melakukan pertimbangan terhadap kualitas tata kelola korporasi dan pengendalian manajemen, yang didukung oleh pelaksanaan prinsip etika bisnis.

Penelitian sehubungan dengan pertimbangan auditor atas penerapan tata kelola korporasi dan penerapan kode etik bagi manajemen senior korporasi masih sangat jarang dilakukan (Bedard dan Johnstone, 2004). Di antara yang sudah ada, yaitu penelitian yang menunjukkan perlunya auditor mempertimbangkan efektivitas tata kelola korporasi klien, karena berpengaruh terhadap risiko audit dan risiko bisnis auditor yang dilakukan oleh DeZoort dan Salterio (2001), Carcello dan Neal (2000), Cohen *et al.* (2002). DeZoort dan Salterio (2001) menemukan bukti bahwa anggota komite audit yang kurang berpengalaman dalam tata kelola korporasi, dan kurang memiliki pengetahuan dalam pelaporan keuangan dan audit kurang membantu auditor eksternal. Carcello dan Neal (2000) menemukan bukti bahwa dalam perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, terdapat hubungan negatif keberadaan direktur independen dalam komite audit dengan kemunculan opini *going concern*. Cohen *et al.* (2002) melaporkan bahwa auditor menemukan komite audit menjadi tidak efektif dalam proses pengawasan pelaporan keuangan, karena kurangnya keahlian dan kekuasaan untuk melaksanakan peran bersangkutan.

Terdapat beberapa penelitian lain yang memberikan bukti bahwa auditor menilai situasi yang menyangkut manajemen yang agresif dan tata kelola korporasi yang tidak memadai, serta terdapat hubungan antara penilaian tersebut dengan perencanaan dan penetapan harga yang dibuat auditor, yaitu yang dilakukan oleh Bedard dan Johnstone (2004), Cohen dan Hanno (2000). Bedard dan Johnstone (2004) menemukan bukti bahwa auditor merencanakan peningkatan upaya audit dan tarif penagihan untuk klien dengan risiko manipulasi laba, dan terdapat hubungan positif antara risiko manipulasi laba baik dengan peningkatan upaya audit maupun tarif penagihan, serta tarif tagihan meningkat bagi klien yang juga memiliki risiko tata kelola korporasi. Cohen dan Hanno (2000) mendapatkan bukti bahwa pertimbangan perencanaan pendahuluan dan perencanaan dipengaruhi oleh kualitas tata

kelola  
relev  
mana  
men  
sikap  
ketir  
etika  
tata  
etis,  
ditel  
men

peru  
man  
No.  
Mer  
pen  
kete  
kait  
kon  
digu  
proj  
dila  
mer

seb  
diru

kelola korporasi dan filosofi pengendalian manajemen. Penelitian lain yang relevan, sehubungan dengan auditor juga menilai situasi yang menyangkut manajemen yang agresif adalah penelitian Diacon dan Ennew (1996), yang menunjukkan bahwa kebijakan etis memiliki tampilan yang lebih tinggi, serta sikap dan perilaku etis lebih positif dalam perusahaan *mutual insurance* ketimbang *stock insurance*. Hasil ini mendukung anggapan bahwa budaya etika korporasi yang kuat dapat dimanfaatkan untuk memperkuat instrumen tata kelola korporasi. Dengan membentuk budaya organisasi berdasar nilai etis, keinginan eksekutif mengabaikan kepentingan pemilik perusahaan bisa ditekan, sehingga menurunkan biaya transaksi yang diperlukan dalam memonitor dan mengikat perilaku manajemen mementingkan diri sendiri.

Temuan Cohen dan Hano (2000) sejalan dengan kewajiban perusahaan publik untuk menerapkan tata kelola korporasi dan kode etik bagi manajemen senior (SOX 2002 dalam Elder *et al.*, 2008; SK Meneg. BUMN No. 17/2002, dalam Tjager, 2003). Mengingat ketentuan SOX 2002 dan SK Meneg. BUMN No. 17/2002 masih relatif baru, maka perlu dilakukan penelitian dalam rangka mendapatkan bukti empirik sehubungan dengan keterkaitan penerapan tata kelola korporasi dan etika bisnis klien dalam kaitannya dengan potensi kecurangan pelaporan keuangan, khususnya dalam konteks Indonesia; dilihat dari persepsi auditor. Pendekatan persepsi digunakan mengingat komponen risiko, ditentukan oleh auditor berdasarkan *professional judgment*, yang merupakan pertimbangan atau penilaian yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki pendidikan dan keahlian yang memadai (Elder *et al.*, 2008; Louwers *et al.*, 2007).

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah teridentifikasi, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa signifikan, menurut persepsi auditor, keterkaitan kualitas tata kelola korporasi klien terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan.
2. Seberapa signifikan, menurut persepsi auditor, keterkaitan implementasi prinsip etika bisnis klien terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan.
3. Seberapa signifikan, menurut persepsi auditor, keterkaitan kualitas tata kelola korporasi dan implementasi prinsip etika bisnis klien terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan.

## TEORI DAN HIPOTESIS

### Tata Kelola Korporasi dan Kecurangan Pelaporan Keuangan

Sehubungan dengan kualitas tata kelola korporasi dan kecurangan pelaporan keuangan, terdapat beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu McMullen (1996), Mc Mullen dan Raghunandan (1996), Beasley (1996), Abbot *et al.* (2000), Beasley *et al.* (2000), Seamer dan Psaros (2000), dan Sharma (2004).

Studi pertama dilakukan McMullen (1996). Studi memberikan bukti sehubungan dengan apakah komite audit berhubungan dengan pengurangan terjadinya kesalahan (*errors*), kecurangan (*irregularities*), serta indikator lain dari pelaporan keuangan. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa perusahaan dengan pelaporan keuangan yang handal (yakni, tidak ada kesalahan, kecurangan, dan tindakan melanggar hukum) memiliki komite audit.

Selanjutnya, McMullen dan Raghunandan (1996) juga memeriksa peran dan efektivitas komite audit dengan melakukan survei perusahaan yang mengalami masalah pelaporan keuangan dengan perusahaan yang tidak mengalami masalah bersangkutan. Hasil penelitian mereka memperlihatkan bahwa perusahaan yang mengalami masalah pelaporan keuangan memiliki komite audit yang tidak terdiri dari direktur luar semata, tidak memiliki sedikitnya satu CPA, dan komite audit tidak sering melakukan rapat.

Studi berikutnya, dilakukan oleh Beasley (1996). Studi ini menemukan bukti bahwa kemungkinan perusahaan yang memiliki pengalaman kecurangan manajemen menurun sejalan dengan persentase direktur luar dalam dewan komisaris. Tetapi, hasil penelitiannya tidak memperlihatkan pengaruh yang signifikan dari keberadaan komite audit dan komposisinya terhadap potensi kecurangan. Dia menjelaskan bahwa ukuran sampel yang kecil bisa jadi penyebab hal tersebut.

Abbot *et al.* (2000) melakukan studi yang memperlihatkan bahwa efektivitas komite audit untuk keperluan deteksi kecurangan merupakan fungsi dari kehadiran anggota luar dari komite audit dan frekuensi rapat komite audit. Tetapi, mereka tidak menemukan hubungan signifikan antara karakteristik dewan komisaris dan kecurangan. Temuan ini berbeda dengan Beasley (1996). Abbot *et al.* (2000) mensifatkan ketidak konsistenan ini kepada perbedaan sampel dan penekanan yang lebih besar oleh komite audit atas proses pelaporan keuangan. Tetapi, temuan Abbot *et al.* (2000) konsisten dengan McMullen (1996) dan McMullen dan Raghunandan (1996).

kecur  
Mere  
keseh  
kecur  
adala  
serta  
keuar  
yang  
tidak  
bahw  
Apab  
terdir  
lebih  
Perus  
memi

hubun  
area  
karak  
indep  
pelak  
perio  
kecur  
besar  
ketim  
komp  
propo  
renda  
meng  
kecur

Beas  
meny  
dan  
samp  
peran  
berpa

Kemudian, Beasley *et al.* (2000) melakukan studi deskriptif terhadap kecurangan dan mekanisme tata kelola korporasi berdasarkan industri. Mereka menganalisis tiga industri yang berbeda, yaitu teknologi, perawatan kesehatan, dan jasa keuangan. Mereka memperlihatkan bahwa sifat kecurangan berbeda menurut industri, yaitu kecurangan terkait pendapatan adalah lebih umum pada perusahaan teknologi, dan kecurangan terkait aset serta penyalahgunaan aset adalah lebih umum dalam perusahaan jasa keuangan. Kebanyakan kecurangan juga ditemukan terjadi dalam perusahaan yang lebih kecil, di mana mayoritas utama dari perusahaan tersebut adalah tidak diperdagangkan di NYSE atau AMEX. Mereka juga memperlihatkan bahwa perusahaan pelaku kecurangan cenderung tidak memiliki komite audit. Apabila perusahaan bersangkutan memiliki komite audit, maka sebagian besar terdiri dari orang dalam, dan mempunyai rapat komite audit tahunan yang lebih sedikit ketimbang pada perusahaan bukan pelaku kecurangan. Perusahaan pelaku kecurangan juga tidak memiliki fungsi internal audit, dan memiliki dewan komisaris dengan direktur luar yang lebih sedikit.

Studi yang dilakukan Seamer dan Psaros (2000) menyelidiki hubungan *univariate* antara proporsi direktur internal, direktur kelabu (*gray area director*, yaitu direktur yang bukan karyawan perusahaan tetapi memiliki karakteristik mengurangi independensi seperti anggota keluarga), dan direktur independen pada dewan komisaris, dengan sampel 27 perusahaan publik pelaku kecurangan, dan 27 perusahaan publik bukan pelaku kecurangan untuk periode 1985-1988. Mereka menemukan bukti bahwa perusahaan pelaku kecurangan secara statistik memiliki proporsi direktur internal yang lebih besar secara signifikan, dan proporsi direktur independen yang lebih rendah ketimbang pada perusahaan bukan pelaku kecurangan. Namun, ke dua ukuran komposisi dewan komisaris mempunyai pengaruh yang sama. Yaitu, apabila proporsi direktur internal tinggi, maka proporsi direktur independen akan rendah; dan sebaliknya. Selanjutnya, pengujian *univariate* mereka tidak mengontrol variabel eksogen yang ditemukan mempengaruhi kemungkinan kecurangan.

Terakhir, Sharma (2004) melakukan studi yang memperluas temuan Beasley (1996) dan Abbot *et al.* (2000) untuk konteks Australia, yaitu menyelidiki hubungan antara dua atribut dewan komisaris, yaitu independensi dan dualitas (presiden komisaris merangkap direksi), serta kecurangan. Di samping itu, dia juga memeriksa apakah kepemilikan institusional memainkan peranan dalam konteks kecurangan. Dengan menggunakan sampel berpasangan berupa perusahaan pelaku kecurangan dan perusahaan bukan

pelaku kecurangan dari 1988-2000, Sharma (2004) menemukan bukti bahwa dengan naiknya persentase direktur independen dan persentase pemilikan institusional independen, maka kemungkinan kecurangan menurun.

### **Etika Bisnis dan Kecurangan Pelaporan Keuangan**

Studi sehubungan dengan implementasi prinsip etika bisnis dan kecurangan pelaporan keuangan telah dilakukan oleh David *et al.* (1994), Diacon dan Ennew (1996), Karcher (1996), Ludigdo dan Mahfoedz (1999), Murtanto dan Marini (2003).

David *et al.* (1994) melakukan penelitian di AS mengenai persepsi auditor terhadap kode etik, serta pengaruh persepsi auditor atas perilaku tidak etis terhadap KAP. Unit analisis penelitian ini adalah para auditor. Penelitian dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada para auditor tersebut. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam persepsi auditor terhadap kedua belas dilema etika berpengaruh terhadap KAP.

Selanjutnya, Diacon dan Ennew (1996) melakukan penelitian eksplorasi mengenai implementasi budaya dan kebijakan etika korporasi sebagai tambahan terhadap bentuk tata kelola korporasi yang formal. Industri asuransi memanfaatkan berbagai struktur tata kelola eksternal, tetapi yang hampir khas dalam *stock companies* (yang dimiliki oleh sebagian pelanggan) tidak ikut bersaing. Survey kuesioner terhadap eksekutif senior dalam perusahaan asuransi UK dilaksanakan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan dan kode etik, untuk menyelidiki sikap etis, dan menganalisis luasnya kebijakan dan sikap ini bervariasi di antara perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan etis memiliki tampilan yang lebih tinggi, serta sikap dan perilaku etis lebih positif dalam *mutual insurance* ketimbang *stock insurance*. Hasil ini mendukung anggapan bahwa budaya etika korporasi yang kuat dapat dimanfaatkan untuk memperkuat instrumen tata kelola korporasi.

Kemudian, Karcher (1996) melakukan penelitian di AS mengenai sensitivitas etika sebagai kemampuan untuk menginterpretasikan situasi tertentu dan memahami adanya masalah moral. Unit analisis penelitian adalah auditor dari KAP 6 Besar. Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara eksperimen. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa faktor yang berguna untuk memprediksi apakah seorang auditor akan menyebutkan isu etika atau tidak dibuktikan tidak signifikan. Selanjutnya justru isu etika itu sendiri

merupakan faktor signifikan dalam menentukan kepentingan absolut yang diberikan kepada isu etika tersebut.

Berikutnya, Ludigdo dan Mahfoedz (1999) melaporkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara akuntan dan mahasiswa akuntansi sehubungan dengan persepsi mereka terhadap etika bisnis. Selain itu, Ludigdo (1999) juga menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pria dan wanita serta mahasiswa dan mahasiswi akuntansi terhadap etika bisnis.

Terakhir, Murtanto dan Marini (2003) melakukan observasi mengenai pengaruh perbedaan jender, dalam bentuk persepsi akuntan dan mahasiswa akuntansi terhadap etika bisnis dan etika profesi akuntan. Disamping itu, juga mengobservasi persepsi mana yang lebih baik di antara pria dan wanita dari akuntan dan mahasiswa akuntansi atas etika bisnis dan etika profesi akuntan. Sampel berupa 192 responden yang terdiri dari akuntan dan mahasiswa akuntansi, dan dikumpulkan melalui *questioner* serta distribusi *convenience*. Uji hipotesis menggunakan *Mann-Whitney U test* dan *Mean*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi pria maupun wanita, baik sebagai akuntan maupun mahasiswa akuntansi, mengenai etika profesi akuntan, di mana pria mempunyai persepsi yang lebih baik ketimbang wanita. Sedangkan terhadap etika bisnis, terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi akuntansi; sebaliknya terdapat persamaan persepsi di antara akuntan pria dan wanita. Akuntan wanita dan mahasiswa akuntansi mempunyai persepsi lebih baik mengenai etika bisnis ketimbang akuntan pria dan mahasiswi akuntansi.

Di samping studi yang telah dikemukakan, terdapat beberapa penelitian sehubungan dengan penilaian auditor terhadap klien yang berisiko, yaitu klien yang berkemungkinan besar mengalami masalah dalam pelaporan keuangan (Asare *et al.*, 1994; Bernardi, 1994; Beasley, 1996; KPMG, 1999; Wright, 1996). Asare *et al.* (1994) melakukan wawancara terhadap rekan audit dari KAP Big 6 dan berkesimpulan bahwa penilaian integritas manajemen merupakan pusat perhatian dalam proses penerimaan klien. Selanjutnya, Bernardi (1994) melakukan manipulasi terhadap faktor berlevel makro yang berhubungan dengan integritas klien, dan menemukan bukti bahwa faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap kemampuan penemuan kecurangan. Selanjutnya, Beasley (1996) menemukan bukti bahwa komite audit yang signifikan mengurangi kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. Kemudian, KPMG (1999) melakukan studi sehubungan dengan kecurangan

korporasi, dan menemukan bukti bahwa mayoritas kasus kecurangan berhubungan dengan faktor yang terdapat dalam lingkungan pengendalian, seperti rendahnya integritas manajemen. Akhirnya, Wright (1996) juga mencatat bahwa lemahnya tata kelola korporasi berhubungan dengan meningkatnya tindakan penertiban SEC terhadap perusahaan atau auditornya.

### **Tata Kelola Korporasi, Etika Bisnis dan Kecurangan Pelaporan Keuangan**

Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh karakteristik manajemen dan tata kelola terhadap proses pelaporan keuangan dilakukan oleh Loebbecke *et al.* (1989), McMullen (1996), Wright (1996), Beasley (1996), Beasley *et al.* (1999), Cohen dan Hanno (2000). Loebbecke *et al.* (1989) menemukan bukti bahwa sikap manajemen yang terlalu agresif dalam pelaporan keuangan berhubungan dengan kecurangan laporan keuangan. Manajemen lebih cenderung melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan SEC melakukan tindakan penertiban, ketika tidak ada pengawasan yang memadai dari dewan komisaris dan komite audit. Kemudian, McMullen (1996) menemukan bukti bahwa perusahaan yang memiliki komite audit yang aktif memiliki kesalahan (*errors*), kecurangan (*irregularities*), tuntutan pemegang saham, dan mengalami pergantian auditor yang lebih sedikit ketimbang perusahaan yang tidak memiliki komite audit. Wright (1996) menunjukkan bukti bahwa komposisi komite audit berhubungan kuat dengan kualitas laporan keuangan. Semakin bertambah persentase direktur dalam dan direktur kelabu (*gray area director*, yaitu direktur yang bukan karyawan perusahaan tetapi memiliki karakteristik mengurangi independensi seperti anggota keluarga) di dalam komite audit, maka kualitas pelaporan keuangan menurun.

Beasley (1996) membandingkan perusahaan yang melakukan kecurangan dengan perusahaan pasangan yang tidak melakukan kecurangan, dan menemukan bukti bahwa perusahaan pelaku kecurangan ditengarai oleh rendahnya persentase anggota dewan komisaris dari luar. Direktur luar dalam perusahaan pelaku kecurangan memegang proporsi saham biasa yang lebih rendah, dan memegang jabatan direktur selama periode waktu tertentu, apabila dibandingkan dengan direktur luar dari perusahaan bukan pelaku kecurangan.

Beasley *et al.* (1999) menganalisis sekitar 200 kasus kecurangan pelaporan keuangan, dan menemukan bukti bahwa perusahaan bersangkutan umumnya memiliki teladan (*tone at the top*) yang tidak baik, dan kegiatan tata

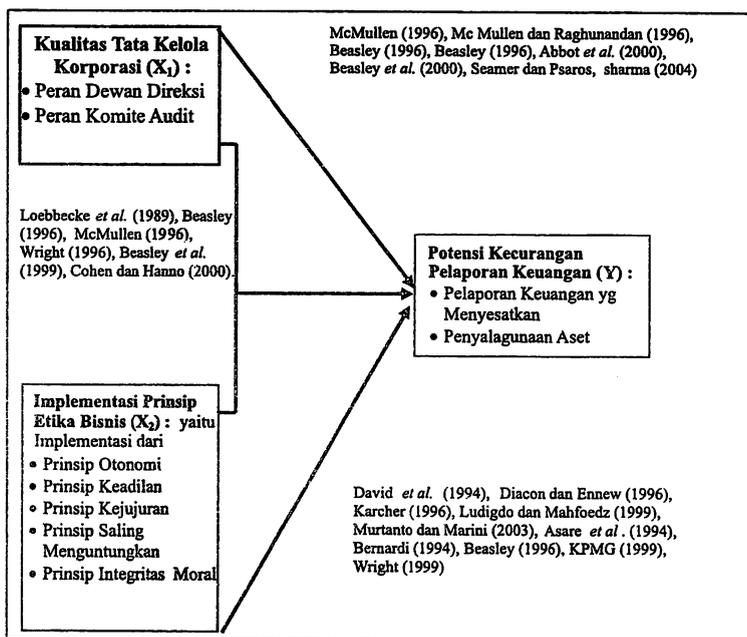
kelo  
pen  
tata  
kepu  
bisa  
pen  
digu  
hipo  
pen  
pen  
kelo  
pere  
pen

Mo  
Dar  
moc

kelola adalah tidak efektif. Terakhir, Cohen dan Hanno (2000) melakukan penelitian di AS mengenai hubungan antara kedua faktor bertaraf makro (yaitu tata kelola korporasi dan filosofi pengendalian manajemen) dan kedua keputusan perencanaan awal (yaitu, penerimaan klien, dan penilaian risiko bisnis) dan keputusan perencanaan (yaitu, luas dan waktu pengujian). Unit penelitian mereka adalah para auditor berpengalaman. Pendekatan yang digunakan adalah para auditor diminta melakukan penilaian terhadap klien hipotetis yang memiliki karakteristik tata kelola korporasi dan filosofi pengendalian manajemen baik yang kuat maupun yang lemah. Kesimpulan penelitian mereka adalah filosofi pengendalian manajemen dan struktur tata kelola benar-benar mempengaruhi keputusan perencanaan awal dan perencanaan. Selanjutnya, para auditor kurang sepekat dalam menilai pengaruh atas waktu pengujian.

### Model Penelitian

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan terdahulu, dapatlah dibuat model penelitian seperti tampak pada Gambar 1



**Gambar 1**  
Model Konseptual Penelitian

### **Pengembangan Hipotesis**

Potensi kecurangan pelaporan keuangan merupakan pusat perhatian auditor dari waktu ke waktu. Dalam rangka menentukan ada/tidaknya kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan, auditor harus mempertimbangkan kualitas tata kelola korporasi klien [McMullen (1996), Mc Mullen dan Raghunandan (1996), Beasley (1996), Abbot *et al.* (2000), Beasley *et al.* (2000), Seamerd an Psaros (2000), Sharma (2004)]. Berdasarkan hal tersebut dapatlah dirumuskan Hipotesis-1 sebagai berikut: Menurut persepsi auditor, kualitas tata kelola korporasi klien mempunyai keterkaitan yang signifikan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan.

Selanjutnya, auditor juga harus mempertimbangkan implementasi prinsip etika bisnis klien sebagai bagian dari integritas manajemen klien [David *et al.* (1994), Diacon dan Ennew (1996), Karcher (1996), Wright, Ludigdo dan Mahfoedz (1999), Murtanto dan Marini (2003), Asare *et al.* (1994), Bernardi (1994), Beasley (1996), KPMG (1999), Wright (1999)].

Berdasarkan hal tersebut dapatlah dirumuskan Hipotesis-2 sebagai berikut: Menurut persepsi auditor, implementasi prinsip etika bisnis klien mempunyai keterkaitan yang signifikan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan. Auditor juga harus mempertimbangkan secara simultan kualitas tata kelola korporasi maupun implementasi prinsip etika bisnis klien sebagai bagian dari integritas manajemen, dalam rangka menentukan ada/tidaknya kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan [Loebbecke *et al.* (1989), Beasley (1996), McMullen (1996), Wright (1996), Beasley *et al.* (1999), Cohen dan Hanno (2000)]. Berdasarkan hal tersebut dapatlah dirumuskan Hipotesis-3 sebagai berikut: Menurut persepsi auditor, kualitas tata kelola korporasi dan implementasi prinsip etika bisnis klien, secara simultan, mempunyai keterkaitan yang signifikan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Metode yang Digunakan**

Ghauri dan Gronhaug (2002: 47) mencatat bahwa metode yang digunakan, berhubungan dengan masalah dan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian. Sehubungan dengan metode yang digunakan, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diungkapkan dengan jelas, yang oleh Sekaran (2003: 117-118) disebut sebagai rincian studi (*details of study*), yang mencakup: Sifat studi, Jenis penyelidikan, Tingkat intervensi peneliti, Situasi studi, Unit

analisis, dan Horison waktu. Dilihat dari aspek sifat studi, maka penelitian ini bersifat uji hipotesis (*hypothesis testing*), karena menentukan independensi dari variabel yang diteliti, Dalam hal ini, jenis penyelidikan dari penelitian ini adalah kausal, karena membuktikan hubungan sebab-akibat dari ke tiga variabel yang diteliti. Berdasarkan aspek tingkat intervensi peneliti, maka penelitian ini dilakukan dalam lingkungan alami organisasi dengan intervensi minimum dari peneliti dalam arus kerja yang normal. Dilihat dari aspek situasi studi, maka penelitian ini termasuk dalam *field experiment*, karena studi dilakukan dengan menggunakan lingkungan alami, di mana pekerjaan berproses secara normal (*non-contrived*). Unit analisis penelitian adalah bersifat individual, yaitu berupa Akuntan Publik yang ada di Indonesia. Penelitian ini termasuk studi *cross-sectional (one-shot)*, karena data hanya sekali dikumpulkan, yaitu dalam bentuk kuesioner mengenai persepsi auditor sehubungan dengan variabel yang diteliti.

#### **Operasionalisasi Variabel**

Merujuk kepada rumusan masalah dan hipotesis dari penelitian ini, maka terdapat tiga variabel yang diteliti, yaitu kualitas tata kelola korporasi, implementasi prinsip etika bisnis, dan potensi kecurangan pelaporan keuangan. Agar ke tiga variabel tersebut dapat diukur, maka perlu ditetapkan definisi secara operasional. Mendefinisikan variabel secara operasional berarti meliputi tindakan berikut: menetapkan variabel, menentukan dimensi (sub-variabel), dan menetapkan elemen (indikator) serta skala pengukuran yang sesuai (Sekaran, 2003).

Dalam Tabel 1. disajikan operasionalisasi variabel yang diobservasi yang terdiri unsur: variabel (konsep), sub-variabel (dimensi) dan sumber, indikator (elemen), skala pengukuran, dan butir kuesioner yang dirujuk.

**Tabel 1.**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Dimensi & Sumber	Indikator	Skala Pengukuran	Nomor Kuesioner
Kualitas Tata Kelola Korporasi Yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan komite audit untuk menjamin integritas proses pelaporan keuangan (Bedard dan Johnstone, 2004)	Peran Dewan Komisaris: Yaitu keberadaan dan keterlibatan dewan komisaris (Bedard dan Johnstone, 2004)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan klien jarang menghadapi masalah pengunduran diri anggota dewan komisaris.</li> <li>2. Dewan Komisaris bersikap independen terhadap manajemen klien.</li> <li>3. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat dengan Direksi dan pejabat akuntansi klien tepat pada waktunya.</li> <li>4. Dewan Komisaris diberi informasi tepat pada waktunya, sehingga memungkinkannya untuk melakukan <i>monitoring</i> terhadap tindakan manajemen yang penting.</li> <li>5. Dewan Komisaris perusahaan klien diberi informasi mengenai hal-hal penting tepat pada waktunya.</li> </ol>	Ordinal (Hair <i>et al.</i> , 2006)	1 - 5
	Peran Komite Audit: Yaitu keberadaan dan keterlibatan komite audit (Bedard dan Johnstone, 2004)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komite audit klien memiliki anggaran dasar yang tertulis secara formal.</li> <li>2. Komite Audit menyelenggarakan rapat dengan Direksi dan pejabat akuntansi klien tepat pada waktunya.</li> <li>3. Komite Audit klien seringkali berisi para direktur dari pihak luar.</li> <li>4. Komite Audit bersikap independen terhadap manajemen perusahaan klien.</li> <li>5. Anggota Komite Audit memiliki keahlian dalam bidang keuangan.</li> <li>6. Komite Audit diberi informasi tepat pada waktunya, sehingga memungkinkannya untuk melakukan <i>monitoring</i> terhadap tindakan manajemen yang penting.</li> </ol>	Ordinal (Hair <i>et al.</i> , 2006)	6 - 11
Implementasi Prinsip Etika Bisnis Yaitu pelaksanaan lima prinsip etika bisnis dalam perusahaan klien (Gupta dan Sulaiman, 1996)	Implementasi Prinsip Otonomi Yaitu keberadaan dan pelaksanaan prinsip otonomi (Diacon dan Ennew, 1996; Gupta dan Sulaiman, 1996.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akibat tekanan yang dilakukan, permasalahan teknis diselesaikan dengan cara yang menguntungkan klien.</li> <li>2. Klien menaruh perhatian terhadap akibat dari permasalahan teknis diselesaikan dengan cara yang menguntungkan klien.</li> <li>3. Klien seringkali menggunakan sarana hukum untuk membela kepentingan perusahaan.</li> <li>4. Klien seringkali merancang struktur komisi penjualan, apabila diperlukan, agar terhindar dari penyimpangan.</li> <li>5. Klien seringkali mendorong kesesuaian produk dengan persyaratan kesehatan dan keselamatan</li> </ol>	Ordinal (Hair <i>et al.</i> , 2006)	12 - 16
	Implementasi Prinsip Keadilan: Yaitu keberadaan dan pelaksanaan prinsip keadilan (Diacon dan Ennew, 1996; Gupta dan Sulaiman, 1996.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jam kerja tidak dilaporkan semestinya.</li> <li>2. Klien menaruh perhatian terhadap akibat dari jam kerja tidak dilaporkan semestinya.</li> <li>3. Biaya-biaya perusahaan dilaporkan tidak semestinya.</li> <li>4. Klien menaruh perhatian terhadap akibat dari biaya-biaya perusahaan dilaporkan tidak semestinya</li> </ol>	Ordinal (Hair <i>et al.</i> , 2006)	17 - 20

Tabel 1. ( Lanjutan )

Variabel	Dimensi & Sumber	Indikator	Skala Pengukuran	Nomor Kuesioner
	<b>Implementasi Prinsip Kejujuran:</b> Yaitu keberadaan dan pelaksanaan prinsip kejujuran (Diacon dan Ennew, 1996; Gupta dan Sulaiman, 1996).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak melakukan koreksi atas penghilangan yang telah diketahui.</li> <li>2. Klien menaruh perhatian terhadap akibat dari tidak melakukan koreksi atas penghilangan yang telah diketahui.</li> <li>3. Tidak melakukan koreksi atas kesalahan yang telah diketahui.</li> <li>4. Klien menaruh perhatian terhadap akibat dari tidak melakukan koreksi atas kesalahan yang telah diketahui</li> </ol>	Ordinal (Hair <i>et al.</i> , 2006)	21 - 24
	<b>Implementasi Prinsip Saling Menguntungkan:</b> Yaitu keberadaan dan pelaksanaan prinsip saling menguntungkan (Diacon dan Ennew, 1996; Gupta dan Sulaiman, 1996).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian prestasi yang tidak adil.</li> <li>2. Klien menaruh perhatian terhadap akibat dari penilaian prestasi yang tidak adil.</li> </ol>	Ordinal (Hair <i>et al.</i> , 2006)	25 - 26
	<b>Implementasi Prinsip Integritas Moral:</b> Yaitu keberadaan dan pelaksanaan prinsip integritas moral (Diacon dan Ennew, 1996; Gupta dan Sulaiman, 1996).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien jarang menggunakan informasi yang menyesatkan mengenai pesaing.</li> <li>2. Klien menghindari tindakan untuk memperbaiki prestasi jangka pendek, apabila hal tersebut tidak menguntungkan dalam jangka panjang.</li> <li>3. Klien jarang sekali menggunakan <i>creative accounting</i> guna merekayasa laba.</li> </ol>	Ordinal (Hair <i>et al.</i> , 2006)	27 - 29
<b>Potensi Kecurangan Pelaporan Keuangan</b> Yaitu faktor spesifik yang menyebabkan munculnya risiko kecurangan dalam perusahaan, dalam bentuk pelaporan keuangan yang menyesatkan maupun penyalahgunaan aset (Beasley <i>et al.</i> , 1996).	<b>Pelaporan Keuangan yg Menyesatkan:</b> Yaitu salah-saji material atau penghilangan pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai (Lobbecke <i>et al.</i> , 1989; Beasley <i>et al.</i> , 1996; Ricchiute, 2006)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen menghadapi stabilitas keuangan perusahaan terancam oleh kondisi ekonomi, industri, atau operasi.</li> <li>2. Tekanan yang berlebihan terhadap manajemen untuk memenuhi pengembalian pinjaman.</li> <li>3. Kekayaan pribadi manajemen atau dewan komisaris terancam secara material oleh kinerja keuangan perusahaan.</li> <li>4. Taksiran akuntansi signifikan yang merupakan penilaian subjektif, membuka peluang bagi terjadinya kecurangan atas pelaporan keuangan klien.</li> <li>5. Pengawasan dewan komisaris atau komite audit tidak efektif.</li> <li>6. Staf akuntansi, staf audit interen, dan staf teknologi informasi yang sering berpindah kerja.</li> <li>7. Komunikasi yang tidak tepat, merupakan rasionalisasi yang dapat meningkatkan peluang terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan klien.</li> <li>8. Rasionalisasi atas pelanggaran klien terhadap UU Pasar Modal, atau UU dan peraturan lainnya.</li> <li>9. Rasionalisasi terhadap praktik manajemen dalam membuat taksiran yang tidak realistis.</li> </ol>	Ordinal (Hair <i>et al.</i> , 2006)	30 - 38

Tabel 1. ( Lanjutan )

Variabel	Dimensi & Sumber	Indikator	Skala Pengukuran	Nomor Kuesioner
	Penyalahgunaan Aset: Yaitu pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim (Lobbecke <i>et al.</i> , 1989; Beasley <i>et al.</i> , 1996; Ricchiute, 2006)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban keuangan pribadi manajemen menciptakan tekanan terhadap mereka.</li> <li>2. Hubungan yang tidak baik antara manajemen dan karyawan.</li> <li>3. Adanya sejumlah uang tunai yang besar di dalam perusahaan.</li> <li>4. Kesempatan berupa pengendalian interen yang lemah, akibat kurangnya pemisahan tugas yang memadai.</li> <li>5. Kesempatan berupa pengendalian interen yang lemah, akibat kurang ketatnya penyaringan karyawan yang memiliki akses terhadap aset.</li> <li>6. Kesempatan berupa pengendalian interen yang lemah, akibat tidak ada cuti wajib bagi karyawan yang memiliki akses terhadap aset.</li> <li>7. Rasionalisasi atas pengabaian pentingnya <i>monitoring</i> terhadap penyalahgunaan aset.</li> <li>8. Rasionalisasi atas pengabaian pentingnya pengendalian interen.</li> </ol>	Ordinal (Hair <i>et al.</i> , 2006)	39 - 46

### Sumber dan Cara Penentuan Data

Mengacu kepada masalah penelitian dan hipotesis yang dikemukakan terdahulu, sumber data untuk penelitian ini adalah data primer, yaitu berupa individu Akuntan Publik (AP) di Indonesia sehubungan dengan pekerjaan profesional yang dilakukan. Sedangkan perusahaan klien yang diaudit terdiri dari perusahaan publik dan non publik. Dari AP digali informasi sehubungan dengan variabel yang diteliti guna mencapai tujuan penelitian. Dengan demikian Akuntan Publik di Indonesia merupakan populasi penelitian ini.

Sehubungan dengan *sampling*, maka perlu dilakukan beberapa pentahapan. Pertama-tama, perlu ditentukan populasi dari penelitian yang akan dilakukan. Kemudian, penentuan kerangka *sampling*. Selanjutnya, pemilihan metode *sampling*, yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk memilih unit analisis penelitian. Terakhir, penentuan besar sampel. Penentuan besar sampel dapat digunakan dengan dua cara, yaitu: menggunakan tabel, dan menggunakan rumus (Ghauri dan Gronhaug, 2002: 112-114).

Sebagaimana dikemukakan terdahulu, populasi penelitian ini adalah Akuntan Publik di Indonesia. Merujuk kepada buku Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik: *Directory* 2006 (IAI-KAP, 2006), diperoleh informasi bahwa di Indonesia terdapat 927 AP (tergabung dalam 465 KAP termasuk cabang). Dari jumlah 927 AP, terdapat 356 AP anggota FAPM (yang bernaung dalam 224 KAP). Atas dasar populasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka kerangka *sampling* penelitian ini adalah Akuntan Publik di Indonesia.

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode bertujuan (*purposive method*), yaitu berupa penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu (*judgment sampling*).

Pertimbangannya adalah mengingat informasi yang dikumpulkan melalui kuesioner hanya dapat diberikan oleh AP-FAPM (yang merupakan pemimpin rekan atau rekan atau pemimpin dari suatu KAP), maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah AP-FAPM. Adapun alasan yang melandasi adalah berdasarkan SK Bapepam No. VIII.A.I tentang Pendaftaran Akuntan Publik yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, hanya AP-FAPM yang diperkenankan melakukan audit atas perusahaan publik, disamping perusahaan non publik.

Jumlah sampel ditentukan berdasarkan kriteria penentuan sampel menurut SEM. Adapun ketentuan jumlah sampel menurut kriteria SEM adalah sebagaimana dikemukakan Hair *et al.* (2006), yang memberikan patokan minimal 5 hingga 10 responden untuk setiap parameter (dimensi), atau 100 responden untuk suatu penelitian. Penelitian ini sendiri, memiliki 9 dimensi, sehingga minimal responden adalah sebanyak 455 hingga 90 responden. Untuk keperluan penelitian ini, sampel ditetapkan minimal sebanyak 100 responden (sesuai kriteria minimal untuk sampel dari suatu penelitian seperti dikemukakan di atas).

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan teknik penyebaran kuesioner kepada AP-FAPM yang tersebar di seluruh Indonesia. Alamat responden dikutip dari buku Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik: *Directory 2006* (IAI-KAP, 2006). Kuesioner disebar dengan dua cara, yaitu melalui pos, dan tenaga kurir.

Kuesioner tentatif yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan melalui tahapan sebagai berikut. Konstruksi teori dalam penelitian ini dikembangkan dari rumusan masalah dan hipotesis yang telah dikemukakan, yaitu berupa variabel yang diteliti. Sumber penelusuran berupa buku teks dan hasil-hasil penelitian yang terdapat di jurnal akuntansi yang berwibawa. Hasil penelusuran tersebut menghasilkan model penelitian seperti yang disajikan dalam Gambar 1. Sumber penulisan indikator empirik sebagian besar diadopsi dari hasil penelitian sesuai dengan variabel yang diteliti, seperti yang disajikan dalam Tabel 1. Operasionalisasi Variabel, khususnya pada kolom sub-variabel/dimensi dan disebutkan sumbernya. Bila dari hasil

penelitian indikator empirik tidak diperoleh, maka indikator empirik dibangun atau disusun berdasarkan diskripsi dari buku teks, seperti misalnya, sebagian besar konsep atau variabel potensi kecurangan pelaporan keuangan dan penilaian risiko kecurangan bersumber dari Ricchiute (2006) dan Messier *et al.* (2006). Dalam hal ini, penyusunan butir kuesioner disusun berdasarkan indikator empirik, dan dibuat dalam bentuk kalimat pertanyaan atau pernyataan dalam bentuk kalimat positif, guna mengurangi kemungkinan salah penafsiran dikalangan individu AP-FAPM. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala pengukuran yang dipilih, yang secara umum menggunakan skala Likert atau sering disebut pula skala sikap (*attitude scale*). Dengan demikian tersusunlah sebuah instrumen penelitian yang disebut kuesioner.

Sebelum kuesioner disebar, maka dilakukan uji coba kuesioner, atau uji validitas dan reliabilitas atas instrumen (kuesioner) penelitian. Uji coba atas kuesioner tentatif dilakukan pada pertengahan Desember 2006 sampai pertengahan Januari 2007. Sebanyak 45 kuesioner tentatif disebar kepada staf pengajar tetap maupun tidak tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (Usakti), Universitas Tarumanagara (Untar), dan Universitas Krida Wacana (Ukrida) yang berlokasi di Jakarta Barat. Berdasarkan kuesioner yang dikembalikan sebanyak 37 responden, maka dibuatlah tabulasi jawaban responden serta dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Item indikator validitas yang signifikan adalah yang mendapat nilai korelasi lebih besar dari 0.30 sesuai dengan kriteria sampel dari uji tabel *r Pearson Product Moment*, sedangkan nilai *Cronbach  $\alpha$*  yang memenuhi kriteria adalah lebih besar dari 0.60 (Sekaran, 2003). Sementara Hair *et al.* (2006: 778) menyebutkan bahwa ketentuan umum dari taksiran reliabilitas adalah 0.7 atau lebih menunjukkan reliabilitas yang baik. Sedangkan reliabilitas di antara 0.6 sampai 0.7 dapat diterima dan menunjukkan validitas konstruk model dari indikator yang baik.

Berdasarkan temuan, penulis berkesimpulan bahwa secara umum kuesioner tentatif dapat digunakan sebagai kuesioner final, sehingga dapat disebar guna mengumpulkan data yang sesungguhnya. Pengumpulan data yang sesungguhnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Tahap pertama, data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner final yang dilakukan sejak pertengahan Januari 2007 sampai dengan pertengahan Maret 2007. Tahap selanjutnya, kuesioner final disebar kepada AP-FAPM di seluruh Indonesia, yang alamatnya mengacu kepada buku Kantor Akuntan Publik dan

Ak  
me  
Ga  
dalku  
Jur  
Da  
me  
28  
Jak

T

K

K

K

K

Su

Sel

189

yan

ber

ber

(2 t

(2 t

177

Akuntan Publik: *Directory* 2006 (IAI-KAP, 2006). Penyebaran dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui jasa pos dan jasa kurir (asisten peneliti). Gambaran mengenai kuesioner yang disebar beserta hasilnya, diperlihatkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. memperlihatkan hal sebagai berikut. Pertama, terkait dengan kuesioner yang disebar, secara keseluruhan berjumlah 356 responden. Jumlah tersebut adalah sama dengan jumlah populasi AP-FAPM di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80.39% disebar di wilayah Jakarta mengingat sebagian besar responden berdomisili di Jakarta, yakni sebanyak 287 responden. Sisanya sebanyak 19.61% disebar di wilayah selain Jakarta.

**Tabel 2.**  
**Rangkuman Hasil Penyebaran Kuesioner Final**

Penyebaran Kuesioner	Lokasi	Jumlah	% Total
Total kuesioner yang disebar	Jakarta	287	80.39
	Luar Jakarta	69	19.61
	<b>Jumlah</b>	<b>356</b>	<b>100.00</b>
Kuesioner yang tidak dikembalikan	Jakarta	(135)	
	Luar Jakarta	(32)	
	<b>Jumlah</b>	<b>(167)</b>	<b>(47.05)</b>
Kuesioner yang kembali	Jakarta	142	
	Luar Jakarta	47	
	<b>Jumlah</b>	<b>189</b>	<b>52.95</b>
Kembali, tidak dapat diolah	Jakarta	(7)	
	Luar Jakarta	(5)	
	<b>Jumlah</b>	<b>(12)</b>	<b>(3.36)</b>
Kembali, dapat diolah	Jakarta	135	
	Luar Jakarta	42	
	<b>Jumlah</b>	<b>177</b>	<b>49.59</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2007.

Selanjutnya, sehubungan dengan pengembalian kuesioner, terdapat sebanyak 189 (52.95%) responden yang mengembalikan. Dari jumlah 189 kuesioner yang dikembalikan, 12 kuesioner di antaranya tidak bisa diolah karena berbagai alasan. Yaitu: (a) pindah alamat (5 buah), (b) AP-FAPM yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di KAP sesuai alamat surat yang dituju (2 buah) (c) mengisi bagian tertentu saja dan membiarkan kosong bagian lain (2 buah), dan (d) tidak mengisi sama sekali (3 buah). Terakhir, sisanya adalah 177 kuesioner dari kuesioner yang dikembalikan responden dan dapat diolah.

Jumlah tersebut telah melebihi jumlah sampel yang ditentukan sesuai kriteria SEM (yaitu minimal 100).

### **Rancangan Analisis Data dan Uji Hipotesis**

Sehubungan dengan analisis data, dilakukan tahapan sebagai berikut. Tahap pertama, menyiapkan data untuk keperluan analisis. Di sini peneliti melakukan hal-hal berikut: pengeditan data, penanganan respon kosong, pengkodean data, pengkategorian data, pembuatan arsip, dan penentuan program. Tahap ke dua, menguji ketepatan data. Pada tahap ini dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Terhadap data final tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas, mengingat uji validitas dan reliabilitas telah dilakukan pada tahap uji coba. Terakhir adalah pengujian hipotesis. Di sini dilakukan manipulasi statistik yang tepat.

Analisis data yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling* (SEM). SEM digunakan untuk menguji model penelitian ini, karena konstruk terdiri dari variabel eksogen dan variabel endogen. Sebelum melakukan formulasi SEM, maka terlebih dahulu perlu melakukan penyesuaian terhadap data tabel induk yang diprogram dalam format Excel, yaitu dilakukan transformasi dengan program bantu *Successive Interval* yang tersedia, agar bisa diolah dalam program LISREL 8.30. Hal ini perlu dilakukan, karena skala pengukuran dalam format excel dan SPSS masih pada tingkat ordinal, sementara analisis SEM mempersyaratkan skala pengukuran kontinu, yakni interval atau rasio. Setelah semua proses ini dilakukan, maka tabel induk dalam bentuk *successive interval* dijalankan dalam program LISREL 8.30.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Merujuk kepada Tabel 3, dapatlah diketahui karakteristik dari responden penelitian ini adalah sebagai berikut. Karakteristik pertama, berdasarkan jenis kelamin. Responden yang berjenis kelamin pria menduduki posisi terbanyak sebagai sampel penelitian yaitu sebesar 85.9%, dibanding sisanya sebesar 14,1% adalah wanita. Selanjutnya, karakteristik ke dua berdasarkan usia. Responden yang terbanyak berada pada kisaran usia antara 51 hingga 55 tahun (39%), diikuti kisaran usia antara 46 hingga 50 tahun (21.5%), dan antara 41 hingga 45 tahun (16.9%). Realitas ini terjadi, mengingat seluruh responden berada pada posisi rekan atau pemimpin rekan yang merupakan posisi puncak di KAP. Dalam kondisi normal, auditor yang berkarir di KAP

memerlukan waktu antara 12 sampai 15 tahun masa kerja untuk meraih posisi rekan atau pemimpin rekan (Arens *et al.*, 2006). Apabila mereka memulai karir pada usia 25 tahun sampai 30 tahun, maka pada posisi sekarang mereka berusia sekurang-kurangnya 40 tahun sampai 45 tahun, dengan catatan mereka berkarir di KAP tertentu tanpa waktu jeda (karena berpindah KAP lain, atau memasuki perusahaan terlebih dahulu misalnya).

Kemudian karakteristik ke tiga, berdasarkan tingkat pendidikan yang ditempuh. Responden berpendidikan sarjana strata satu dengan memiliki gelar akuntan menempati posisi terbanyak yaitu 67.2%. Kondisi terjadi demikian, mengingat komposisi AP-FAPM dari segi usia, mayoritas berada pada kisaran diatas 50 tahun. Hal tersebut berpengaruh terhadap jenjang pendidikan, yang secara umum para AP-FAPM senior tidak meneruskan pendidikan formal. Ke empat, karakteristik berdasarkan perguruan tinggi asal. Responden lulusan dari perguruan tinggi negeri menempati posisi terbanyak (70.6%), sementara lulusan dari perguruan tinggi swasta hanya sebesar 29.4%. Hal ini terjadi karena perguruan tinggi negeri lebih lama relatif terhadap perguruan tinggi swasta, disamping kesempatan yang dimiliki para lulusannya lebih terbuka, mengingat dimasa lalu terdapat dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan swasta, sehingga dampaknya terasa sampai sekarang.

Dan karakteristik terakhir, berdasarkan asal kota responden berdomisili. Responden dari kota Jakarta menduduki persentase tertinggi, kemudian disusul Surabaya dan Bandung dengan persentase masing-masing sebesar 76,3%, 7,3% dan 3,9%. Pada umumnya, AP-FAPM terkonsentrasi di kota-kota besar, khususnya Jakarta, Surabaya dan Bandung. Hal tersebut terjadi karena akuntan terampil cenderung terkonsentrasi di kota besar, mengingat kebutuhan akan tenaga terampil lebih banyak dirasakan di kota besar.

**Tabel 3.**  
**Karakteristik AP-FAPM di Indonesia**

<b>Karakteristik Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
<b>A. Jenis Kelamin :</b>		
1. Pria	152	85,9
2. Wanita	25	14,1
<b>Jumlah</b>	<b>177</b>	<b>100</b>
<b>B. Usia :</b>		
1. < 40 tahun	15	8,5
2. 41 - 45 tahun	30	16,9
3. 46 - 50 tahun	38	21,5
4. 51 - 55 tahun	69	39,0
5. > 56 tahun	25	14,1
<b>Jumlah</b>	<b>177</b>	<b>100</b>
<b>C. Strata Pendidikan:</b>		
1. S1 dengan gelar Ak	119	67,2
2. S2 dengan gelar Ak dan/atau BAP	41	23,2
3. S3 dengan gelar Ak dan/atau BAP	17	9,6
<b>Jumlah</b>	<b>177</b>	<b>100</b>
<b>D. Perguruan Tinggi Asal :</b>		
1. PTN	125	70,6
2. PTS	52	29,4
<b>Jumlah</b>	<b>177</b>	<b>100</b>
<b>Karakteristik Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
<b>E. Kota:</b>		
1. Jakarta	135	76,2
2. Bandung	7	3,9
3. Yogyakarta	1	0,6
4. Surabaya	13	7,3
5. Bandar Lampung	1	0,6
6. Batam	1	0,6
7. Balikpapan	1	0,6
8. Lainnya	18	10,2
<b>Jumlah</b>	<b>177</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2007.

Adapun Hipotesis pertama dari penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut:

Menurut persepsi auditor, kualitas tata kelola korporasi klien mempunyai keterkaitan yang signifikan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis yang dilakukan dengan program bantu statistik LISREL 8.30, dapatlah disajikan hasilnya pada Tabel 4., yang merangkum nilai koefisien parameter maupun uji untuk memudahkan dalam memahami keputusan hipotesis yang diambil. Diperlihatkan bahwa sehubungan dengan apakah kualitas tata kelola korporasi klien mempunyai keterkaitan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan, maka hasil pengujian memperlihatkan nilai estimasi parameter atau nilai gamma sebesar 0.19, dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1.97. Hal ini berarti signifikan pada tingkat keyakinan 95%. Karena nilai  $p$  dari  $t_{hitung}$  (yaitu,  $p = 0.00$ ) lebih kecil dari  $\alpha$  0.05, maka pernyataan hipotesis nol yang menyatakan bahwa menurut persepsi auditor tidak terdapat kaitan kualitas tata kelola korporasi klien terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan adalah ditolak.

Dengan kata lain, menurut persepsi auditor, kualitas tata kelola korporasi klien mempunyai kaitan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan, dengan signifikansi sebesar 19%. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi auditor, kualitas tata kelola korporasi klien mempunyai kaitan yang signifikan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan. Selanjutnya, Hipotesis ke dua penelitian dirumuskan sebagai berikut:

Menurut persepsi auditor, implementasi prinsip etika bisnis klien mempunyai keterkaitan yang signifikan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan. Hasil pengujian memperlihatkan nilai estimasi parameter atau nilai gamma sebesar 0.48, dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5.43. Hal ini berarti signifikan pada tingkat keyakinan 95%. Karena nilai  $p$  dari  $t_{hitung}$  (yaitu,  $p = 0.00$ ) lebih kecil dari  $\alpha$  0.05, maka pernyataan hipotesis nol yang menyatakan bahwa menurut persepsi auditor tidak terdapat keterkaitan implementasi prinsip etika bisnis klien terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan adalah ditolak.

Dengan kata lain, menurut persepsi auditor implementasi prinsip etika bisnis klien mempunyai keterkaitan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan, dengan efek signifikansi sebesar 48%. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat auditor implementasi prinsip etika bisnis klien mempunyai keterkaitan yang signifikan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan.

**Tabel 4.**  
**Rangkuman Pengujian Hipotesis Pertama**

Variabel	Estimasi parameter	$t_{hitung}$	$R^2$	Error varian	Keputusan
KTKK → PORKE	0.19	1.97			Ho ditolak
IPEB → PORKE	0.48	5.43			Ho ditolak
KTKK & IPEB → PORKE			0.31	0.78	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2007.

Hipotesis ke tiga dirumuskan sebagai berikut: Menurut persepsi auditor, kualitas tata kelola korporasi dan implementasi prinsip etika bisnis klien, secara simultan, mempunyai keterkaitan yang signifikan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan.

Pengujian hipotesis yang terakhir di sini adalah melihat efek ke dua variabel tersebut secara simultan, yaitu apakah kualitas tata kelola korporasi dan implementasi prinsip etika bisnis klien mempunyai keterkaitan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan. Hasilnya diperlihatkan dalam Tabel 4. dengan nilai  $R^2$  sebesar 0.31 atau 31%, yang berarti bahwa kualitas tata kelola korporasi dan atas implementasi prinsip etika bisnis klien mempunyai keterkaitan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan sebesar 31%, yang berarti signifikan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa kualitas tata kelola korporasi dan implementasi prinsip etika bisnis klien mempunyai keterkaitan yang signifikan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Pengujian terhadap Hipotesis 1, 2 dan 3 menunjukkan hasil sebagai berikut. Secara parsial, kualitas tata kelola korporasi maupun implementasi prinsip etika bisnis klien mempunyai keterkaitan yang signifikan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan. Di mana efek kualitas tata kelola korporasi klien terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan memiliki signifikansi yang lebih kecil (yaitu 19%) ketimbang keterkaitan implementasi prinsip etika bisnis klien terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan (yaitu

48%). Sedangkan secara simultan, tata kelola korporasi dan implementasi prinsip etika bisnis klien mempunyai keterkaitan yang signifikan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan.

Pembahasan atas hasil pengujian hipotesis sebagaimana telah dikemukakan adalah sebagai berikut. Pertama, pada hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa kualitas tata kelola korporasi klien mempunyai keterkaitan yang signifikan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan, berarti menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan bukti kalau menurut persepsi auditor potensi kecurangan pelaporan keuangan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola korporasi klien. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa potensi kecurangan pelaporan keuangan dapat ditekan oleh dewan komisaris perusahaan yang berperan dengan efektif (Beasley, 1996; Seamer dan Psaros 2000; Sharma, 2004; ), dan/ atau potensi kecurangan pelaporan keuangan dapat ditekan oleh komite audit perusahaan yang berperan dengan efektif (Abbot *et al.*, 2000; McMullen, 1996; Mc Mullen dan Raghunandan, 1996; Beasley *et al.*, 2000).

Ke dua, hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa implementasi prinsip etika bisnis klien mempunyai keterkaitan yang signifikan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan, berarti bahwa penelitian ini memberikan bukti kalau menurut persepsi auditor potensi kecurangan pelaporan keuangan sangat ditentukan oleh implementasi prinsip etika bisnis klien. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa potensi kecurangan pelaporan keuangan dipengaruhi oleh integritas manajemen yang berhubungan dengan perhatian mereka terhadap prinsip etika bisnis (Asare *et al.*, 1994; Beasley, 1999; KPMG, 1999; Wright, 1996; Bernardi, 1994). Ke tiga, pada hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa tata kelola korporasi dan implementasi prinsip etika bisnis klien, secara simultan, mempunyai keterkaitan yang signifikan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan, maka berarti bahwa penelitian ini membuktikan kalau menurut persepsi auditor potensi kecurangan pelaporan keuangan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola korporasi dan / atau implementasi prinsip etika bisnis klien. Temuan ini sejalan dengan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa potensi kecurangan pelaporan keuangan dipengaruhi oleh kualitas tata kelola korporasi dan integritas manajemen yang berhubungan dengan perhatian mereka terhadap prinsip etika bisnis (Loebbecke *et al.*, 1989; Beasley 1996; Beasley *et al.*, 1999; McMullen, 1996; Wright, 1996; Cohen dan Hanno, 2000).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang berhubungan dengan masalah penelitian, diperoleh temuan sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Yaitu, menurut persepsi auditor: 1) Kualitas tata kelola korporasi terbukti mempunyai efek yang signifikan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan, 2) Implementasi prinsip etika bisnis terbukti mempunyai efek yang signifikan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan, dan 3) Kualitas tata kelola korporasi dan implementasi prinsip etika bisnis terbukti mempunyai efek yang signifikan terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan

Merujuk kepada temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberikan bukti secara empirik sehubungan dengan hal berikut. Yaitu, menurut persepsi auditor: 1) Potensi kecurangan pelaporan keuangan ditentukan oleh kualitas tata kelola korporasi, 2) Potensi kecurangan pelaporan keuangan ditentukan oleh implementasi prinsip etika bisnis, dan 3) Potensi kecurangan pelaporan keuangan ditentukan oleh kualitas tata kelola korporasi dan implementasi prinsip etika bisnis.

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan terdahulu, dapat dikemukakan beberapa saran baik yang bersifat teoritik maupun yang bersifat praktis sebagai berikut. Secara teoritik, kepada perguruan tinggi disarankan untuk memasukkan teori kecurangan ke dalam silabi mata kuliah Auditing; dan kepada peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan potensi kecurangan pelaporan keuangan, baik yang berhubungan dengan atribut auditor yaitu independensi dan kompetensi, maupun yang berhubungan dengan karakteristik manajemen atau pun perusahaan. Secara praktis, kepada manajemen disaeankan menekan potensi kecurangan pelaporan keuangan dengan cara meningkatkan kualitas tata kelola korporasi dan etika bisnis; kepada Bapepam disarankan melakukan regulasi baik kepada perusahaan publik maupun akuntan publik, yang berhubungan dengan upaya menekan serendah mungkin potensi kecurangan pelaporan keuangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L. J., Y. Park, and S. Parker. 2000. "The Effects of Audit Committee Activity and Independence on Corporate Fraud". *Managerial Finance* (26):55-67.
- Arens, Alvin A., Elder, Randal J., and Beasley Mark S. 2006. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Asare, Stephen K., and Arnold M. Wright. 2004. "The Effectiveness of Alternative Risk Assessment and Program Planning Tools in a Fraud Setting", *Contemporary Accounting Research*, Vol. 21. No.2 (Summer), pp. 325-52.
- Beasley, M. S. 1996. "An Empirical Analysis of The Relation Between The Board of Director Composition and Financial Statement Fraud". *The Accounting Review* 71 (October): 443-465.
- Beasley, M. S., J. V. Carcello, and D. R. Hermanson. 1999. *Fraudulent Financial Reporting: 1987-1997*. New York, NY: AICPA.
- Beasley, Mark S., Carcello, Joseph V., Hermanson, Dona R., and Lapides, Paul D. 2000. "Fraudulent Financial Reporting: Consideration of Industry Traits and Corporate Governance Mechanism". *Accounting Horizons*, Vol. 14, No. 4, pp. 441-454.
- Bedard, Jean C., and Johnstone, Karla M. 2004. "Earning Manipulation Risk, Corporate Governance Risk, and Auditors' Planning and Pricing Decisions". *The Accounting Review*, Vol. 79, No. 2, pp. 277-304.
- Bernardi, R. 1994. "Fraud Detection: The Effect of Client Integrity and Competence and Auditor Cognitive Style". *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 13 (Supplement): 68-84.
- Cohen, Jeffrey R., Hanno, Dennis M. 2000. "Auditors' Consideration of Corporate Governance and Management Control Philosophy in Preplanning and Planning Judgments". *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 29, No. 2, pp. 133-146.
- David, Jeanne M., Kantor, Jeffrey, and Greenberg, Ira. 1994. "Possible Ethical Issues and Their Impact on The Firm: Perception Held by Public Accountants". *Journal of Business Ethics* 13, pp. 919-937.

- DeZoort, F. Todd, and Salterio, Steven E. 2001. "The Effect of Corporate Governance Experience and Financial-Reporting and Audit Knowledge on Audit Committee Members' Judgments". *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 20, No. 2, pp. 31-47.
- Diacon, S.R., Ennew, C.T. 1996. "Can Business Ethics Enhance Corporate Governance? Evidence from a Survey of UK Insurance Executives". *Journal of Business Ethics* 15, pp. 623-634.
- Elder, Randal J., and Allen, Robert D. 2003. "A Longitudinal Field Investigation of Auditor Risk Assessment and Sample Size Decisions". *Accounting Review*, Vol. 78, No. 4, pp. 983-1002.
- Ghuri, Pervez and Gronhaug, Kjell. 2002. *Research Methods in Business Studies*. England: Pearson Education Limited.
- Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik Bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2006. *Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik: Directory 2006*. Jakarta.
- Karcher, Julia N. 1996. "Auditors' Ability to Discern the Presence of Ethical Problems". *Journal of Business Ethics* 15, pp. 1033-1050.
- Karpoff, J. M., and J. R. Lott .1993. "The Reputational Penalty Firms Bear from Committing Criminal Fraud". *Journal of Law and Economics* 36 (October): 757-802.
- Keraf, A., Sony. 1998, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Edisi Kesembilan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- KPMG. 1999. *Fraud Survey Results 1999*. New York, NY: PMG.
- Loebecke, J., M. Eining, and J. Willingham. 1989. "Auditors' Experience with Material Irregularities: Frequency, Nature and Detectability". *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 8 (2):1-28.
- Louwers, Timothy J., Ramsay, Robert J., Sinason, David H., and Strawser, Jerry R. 2007. *Auditing & Assurance Services*. New York: Mc Graw-Hill
- Ludigdo, Unti dan Mas'ud Machfoedz. 1999. "Persepsi Akuntan dan Mahasiswa tentang Etika Bisnis". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia No.1. (Januari, II) Ikatan Akuntansi Indonesia*. Jakarta.
- McMullen, D. A.1996. "Audit Committee Performance: An Investigation of The Consequences Associated with Audit Committees". *Auditing: A Journal of Practice & Theory* (15): 87-103.
- McMullen, D. A., and K. Raghunandan. 1996. "Enhancing Audit Committee Effectiveness". *Journal of Accountancy*: 79-81.

- Messier, Jr., William F., Glover, Steven M., and Prawitt, Douglas F. 2006. *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach*. New York: Mc Graw-Hill.
- Murtanto, dan Marini. 2003. "Persepsi Akuntan Pria dan Akuntan Wanita serta Mahasiswa dan Mahasiswi Akuntansi Terhadap Etika Bisnis dan Etika Profesi Akuntan". *Simposium Nasional Akuntan VI*, Surabaya.
- Ricchiute, David N. 2006. *Auditing*. Ohio: Thomson South-Western.
- Seamer, M., and J. Psaros .2000. "Board Composition and The Incidence of Management Perpetrated Fraud". *Working Paper*, The University of New South Wales.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Method for Business: A Skill Building Approach*. New York: John Wiley & Sons.
- Sharma, Vinneta D. 2004. "Board of Director Characteristics, Institutional Ownership, and Fraud: Evidence from Australia". *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 23, No. 2, pp. 105-117.
- Tjager, I Nyoman, Alijoyo, F. Antonius, Djemat, Humphrey R. dan Soembodo, Bambang. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Jakarta: PT Prenhallindo.
- Wright, D. W. 1996. "Evidence on The Relation Between Corporate Governance Characteristics and The Quality of Financial Reporting". *Working paper, University of Michigan*.